

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku:**

- Arikunto, Suharsimi. (2005). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi.(1998). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Anderson, J.E., dkk. (1984). *Publik Policy and politics in America*. California, USA: Wadsworth.
- Creswell, J . (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. (third ed). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Danial,Endang dan Nanan, Wasriah.(2009). *Metoda Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium pendidikan kewarganegaraan UPI.
- Dunn, William. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM Press
- Dunn, William, N., 2003, *Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition*, Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, NJ.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho, 2006, *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang; Model-model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Kompetindo.
- Edwards III, G.C. 1980.*Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Evans, Kevin. (2002). *Pemilu Lokal: Mengembalikan Hak Masyarakat Melalui Reprenstasi Keterwakilan Optimal*. *Jurnal PSPK Edisi 3*
- Grindle, Meerilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Hogwood, B.W. dan L.A. Gunn. 1984. *Policy Analysis for the Real Word*.Oxford University Press.
- Howlett, Michael dan M. Ramesh. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Toronto: Oxford University Press.
- Jones, Charler O, 1970, *An Introduction to the Study of Public Policy*. Belmont, California: Wadsworth, Inc.

Florensina Meokbun, 2016

**KAJIAN EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN SORONG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- LAN RI.(2005). *Sistem Administrasi Negara RI*. Jakarta: Haji Masagung.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Maniagasi, Frans. (2001). *Masa Depan Papua Merdeka, Otonomi Khusus dan Dialog*. Jakarta: Milinium Publisher
- Mazmanian, Daniel dan Paul A. Sabatier (eds). (1981). *Effective Policy Implementation*. Lexington Mass DC: Health.
- Nasution Edwin, dan Usman Hardius. (2007). *Proses Penelitian Kuantitatif*. Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia.
- Nasution. (1998). *Metodelogi Penelitian*. Bandung: PT Tarsito.
- Nasution (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Osborne, David; Geabler, Ted. (1992). *Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, Jakarta: Pustaka Budiman Presindo.
- Osborne, David, dan Plastrik, Peter, (2001), *Memangkas Birokrasi; Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*, PPM: Jakarta.
- Pressman, Jeffrey L. dan Aaron B. Wildavsky. (1973). *Implementation: How Great Expectations in Washington are Dashed in Oakland*. 3<sup>rd</sup> ed. Berkeley: University of California Press.
- Rusli, Budiman, (2013) *Kebijakan Publik (membangun pelayanan publik yang responsif*, Hakim: Bandung.
- Saefullah.(2007). *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik.Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi*.Cetakan pertama. Bandung.
- Smith, Jenkis, (1990). *“Democratic Politics and Policy Analysis”*: California Publishing Company.
- Subarsono, AG. (2009). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sukmadinata Syaodih Nana, (2005).*Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

- Sugiyono, (2011). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sabarnurdin, Sambas. dan Kusumandari Ambar. (2010) *Proposal Penelitian Skripsi*. Yogyakarta; Cakrawala Media
- Sumule, Agus. (2002). *Mencari Jalan Tengah: Otonomi Khusus Provinsi Papua*. Jayapura: Uncen.
- Strauss, Anselm dan Juliet, Corbin. (2003) *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Sitorus, M. (2009). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: UNPAD PRESS.
- Tachjan.(2008). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII Bandung-Puslit KP2W Lemilt Unpad.
- Van Meter, D.S. dan C.E. Van Horn. (1975). “*The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*”, *Administration Society* (February : 445-488).
- Wahab, S.A. (2008). *Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress.
- Wonda Sendius. (2009). *Jeritan Bangsa Rakyat Papua Barat Mencari Keadilan*. Yogyakarta; Galangpress (Ikatan Ikapi).

#### **Dokumen :**

Himpunan Peraturan Tentang Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus, Pembentukan Kabupaten Di Provinsi Papua & Papua Barat.(2013). Jakarta; PT Tamita Utama.

UU Otonomi Khusus bagi Papua Nomor 21 Tahun 2001.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 29 Tahun 2008 tentang urusan kewenangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten Sorong;

Peraturan daerah Kabupaten Sorong Nomor 2 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2011;

Peraturan Bupati Nomor 274 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sorong Tahun 2011;

**Florensina Meokbun, 2016**

***KAJIAN EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN SORONG***

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

Peraturan Bupati Sorong Nomor 154 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sorong Tahun 2013-2017.

BPS dan BP3D Provinsi Papua.(2001). Irian Jaya dalam Agenda 2000.

CSIS.(2004). Membangun Kapasitas Untuk Implementasi Otonomi Khusus di Papua.

DPR-RI. (2001). Draf Akhir Pansus RUU Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Departemen Dalam Negeri. (2002). Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan NAD

----- . (2004). UU Otonomi Daerah 2004.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Percepatan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999. Tentang Pembentukan Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Pania, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

Pemerintah Provinsi Papua. (2002). Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Majelis Rakyat Papua.

Pemerintah Propinsi Irian Jaya. (2001). Draf RUU Otonomi Khusus bagi Papua dalam Bentuk Wilayah Berpemerintahan Sendiri.

UU Otonomi Khusus bagi Papua Nomor 21 Tahun 2001.

UU Otonomi Daerah 1999. Jakarta: Sinar Grafika.

Surat Kabar dan Majalah